

PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

INDRIANA

Magister Akuntansi

Universitas Diponegoro Semarang

(anaindri212@gmail.com)

Abstract

This study aims to determine the effect of Good Governance on Local Government Performance Pangkajene and Kepulauan. The type of research used in this study is quantitative by using descriptive statistical analysis method or SPSS 16. The data is processed is the result of questionnaires from the statement of employees of Pangkep District office. Data analysis techniques using simple linear regression formula and descriptive statistical test through SPSS 16 application. Based on the results of data analysis techniques using the formula used to produce the conclusion that the financial performance of local government of Pangkep district is very influential seen from the level of financial performance of local governments Pangkep district.

Keywords: *Good Governance, Financial Performance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dengan menggunakan metode analisis statistik deskriptif atau SPSS 16. Data yang diolah adalah hasil kuesioner dari pernyataan pegawai kantor daerah Kabupaten Pangkep. Teknik analisis data menggunakan rumus regresi linier sederhana dan uji statistik deskriptif melalui aplikasi SPSS 16. Berdasarkan hasil teknik analisis data dengan rumus yang digunakan menghasilkan kesimpulan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten pangkep sangat berpengaruh dilihat dari tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten pangkajene dan Kepulauan.

Kata Kunci : *Good Governance, Kinerja Keuangan*

PENDAHULUAN

Secara teoritis, tiga pilar terwujud. Artinya masyarakat (community), pasar (market) dan negara (state) adalah bagian yang harus saling mendukung dan mengawasi. Apabila terjadi ketimpangan antara salah satu pilar tersebut, maka demokrasi dan

corporate governance tidak akan memenuhi kewajibannya untuk “taat” kepada negara dengan mematuhi berbagai peraturan dan hukum seperti membayar pajak, retribusi dan lain-lain, demikian halnya negara juga memenuhi kewajibannya dalam

melayani masyarakat yang salah satu perwujudannya dilihat bagaimana aparatur pemerintah melayani masyarakat (INCIS:2005).

Persoalan “saling mengisi” antara ketiga pilar di atas selama ini seringkali bermasalah. Kualitas pelayanan publik oleh pemerintah begitu buruk, sementara partisipasi masyarakat tersumbat. Saluran pengaduan dan penyampaian aspirasi masyarakat belum terbuka lebar. Contoh sederhana yang menunjukkan rendahnya kualitas pelayanan publik dapat dipaparkan sebagai berikut: pengelolaan kegiatan pencatatan penduduk, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), imigrasi dan lain-lain. Pelayanan publik di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu profit dan non-profit. Yang termasuk profit adalah jasa telekomunikasi, air minum, transportasi dan listrik. Termasuk kategori non-profit adalah catatan sipil, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), imigrasi dan KTP.

Pada wilayah pelayanan publik non-profit inilah, aspek pengawasan terhadap implementasi kebijakan publik relatif kurang, untuk tidak menyebut absen sama sekali. Pakar *study* kebijakan, Gilbert, menyatakan bahwa terdapat tiga elemen penting dalam kebijakan, yaitu proses

(*process*), hasil produk (*product*) dan kinerja (*performance*). Pada tataran konsepsi secara legal formal, aturan atau perundangan mengenai pelayanan publik non-profit bisa jadi sudah ideal dalam kerangka melayani kepentingan publik. Namun dalam studi kebijakan dikatakan bahwa *product*, dalam hal ini pelayanan publik non-profit, bukanlah menjadi parameter utama dalam menentukan *performance* birokrasi. Disamping *process* pelibatan *stakeholders* dalam merumuskan kebijakan, kinerja birokrasi pada tataran implementasi memegang peranan penting untuk melihat seberapa jauh *product* dipraktikkan dilapangan.

Seiring dengan lahirnya undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah terutama daerah-daerah yang memiliki potensi untuk berkembang dituntut agar dapat meningkatkan kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan didaerahnya. Kinerja pegawai pemerintah merupakan isu yang menjadi sorotan publik saat ini, hal ini terlihat karena belum menampakkan hasil yang baik yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat menuntut agar pemerintah dapat mengelola dan menjalankan tugas pemerintahan

dengan baik, sehingga dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mahsun (2006:4) mengatakan bahwa kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Berkaitan dengan pelaksanaan kinerja pegawai pemerintah di Indonesia, banyaknya kasus penyimpangan yang ditemukan, menyebabkan kekecewaan dan hilangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri. Untuk mengembalikan dan bisa memulihkan kepercayaan masyarakat, tentunya diperlukan perubahan di segala bidang, yang tentunya bisa memperbaiki kualitas kinerja pemerintah itu sendiri.

Akuntabilitas kinerja diperlukan sebagai pertanggung jawaban terhadap kinerja. Hasil kerja dari pegawai pemerintah dapat diketahui melalui informasi akuntabilitas dari masing-masing instansi pemerintah tersebut. Informasi tentang akuntabilitas diperlukan oleh pemerintah, karena berdasarkan informasi tersebut menjadi bahan pengambilan keputusan pemerintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih baik. Informasi tersebut juga diperlukan

sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban kepala pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat melalui DPR/D setiap akhir tahun anggaran dan diakhiri jabatan Kepala Pemerintah.

Perbincangan pada dialog publik yang di posting oleh F Daus AR (2016) terkait pelayanan kesehatan di daerah Pangkep juga mengkritisi pelayanan publik yang kurang memuaskan diantaranya respon masyarakat:

“Syahrul Syaf dari pemerhati persoalan publik merespon bahwa, administrasi dianggapnya hal urgen yang harus diselesaikan terlebih dahulu ketimbang melakukan pertolongan pertama pada pasien. Hal ini jelas melupakan sisi kemanusiaan. Ia menawarkan solusi futuristik mengurai sengkabut persoalan administrasi ini menggunakan digitalisasi”.

Organisasi sektor publik pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan, akuntabilitas dan berkualitas, serta adanya pembagian tugas yang baik

pada pemerintah, sehingga pelayanan masyarakat dapat di laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kinerja pemerintahan yang buruk dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah kegagalan pemerintahan dalam melakukan pemantauan dan penentuan perencanaan strategis (Pratiwi:2011).

Dimensi lain penyebab buruknya kinerja keuangan pemerintah secara umum adalah seperti suap-menyuap, Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Kasus fakta yang terjadi dilapangan pada saat mensurvey di daerah pangkep disalah satu desa yaitu Desa Taraweang kepala desanya telah melakukan korupsi senilai 1 Milyar dalam hal ini ada kasus Tanah, pembangunan dan lainnya. Kepala desa telah diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengolah dana desa sebagaimana mestinya namun hal yang tidak seharusnya dilakukan itupun terjadi realitanya dilapangan dan akhirnya pada bulan September kepala desanya ditahan oleh polisi akibat kasus korupsi yang dilakukannya.

Pendapat (BPKP 2003) dalam (Sayidah:2007) menyatakan bahwa perusahaan yang menerapkan praktek *good governance* telah berupaya

meminimalkan risiko keputusan yang salah atau yang menguntungkan diri sendiri, sehingga meningkatkan kinerja perusahaan yang pada akhirnya memaksimalkan nilai perusahaan. Baik buruknya kinerja para aparatur pemerintahan dapat ditentukan oleh beberapa faktor, namun faktor yang dijadikan pertimbangan ada dua faktor yaitu 2 penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan komitmen organisasi. Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa empat faktor *good governance* yang meliputi akuntabilitas, transparansi, keadilan dan partisipasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai (Ningsih dkk:2011).

Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan pengaruh globalisasi menyebabkan banyaknya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah mengenai tata kelola pemerintah yang baik, hal ini disebut dengan istilah *good governance*. Konsep *good governance* ini memiliki pengaruh dan peranan sangat penting dalam pelaksanaan kinerja pegawai pemerintahan. Oleh karena itu respon terhadap *good governance* ini sangat tinggi dan pegawai pemerintah pun cukup *concern* mengenai hal ini. *Good governance* sering diartikan sebagai kepemimpinan yang baik atau sebagai suatu penyelenggaraan

manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran dari salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun *administrative*, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Kusmayadi, 2009). Untuk melaksanakan dan membangun prinsip tata kelola pemerintah yang baik tidak mudah. Ini memerlukan waktu yang lama dan usaha yang terus menerus. Selain itu, dalam implikasinya membutuhkan komitmen dan optimisme besar dari seluruh komponen bangsa, yang melibatkan tiga pilar bangsa yaitu aparat pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam rangka memelihara solidaritas untuk mencapai pemerintahan yang baik.

Good governance sebagai sistem yang diterapkan pada pemerintahan demi terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien, sehat dan bermutu, serta memberikan dampak yang baik bagi pemerintah dan masyarakat. Sistem pemerintahan ini muncul di era reformasi karena tuntutan terhadap keadaan pemerintah pada era Orde Baru dengan berbagai

permasalahan yang terutama meliputi pemusatan kekuasaan pada presiden. (Heriyanto:2015) mengemukakan dalam skripsi (Pertiwi, Siti Hardianti Darma:2017) bahwa *good governance* sebagai bagian dari agenda reformasi pada dasarnya merupakan suatu kondisi ideal yang diharapkan terwujud pada setiap aspek pemerintahan yang berinteraksi pada masyarakat. Penerapan *Good Governance* dimaksudkan agar terciptanya keterbukaan informasi, adanya pertanggungjawaban pimpinan, perlakuan adil bagi setiap pegawai dalam menjalankan kewajiban dan menerima hak-haknya sebagai pegawai maupun adanya keterlibatan dari seluruh pegawai dalam pengembangan organisasi menjadi lebih baik lagi.

Dari masalah yang terjadi tersebut, penyimpangan-penyimpangan terjadi dalam beberapa perangkat pegawai pemerintah daerah dan dinas Kabupaten Pangkep yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* yang belum maksimal dan pemerintah daerah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan belum optimal dalam melakukan akuntabilitas kinerjanya terhadap publik, sehingga berpengaruh pula terhadap kualitas kinerja pegawai

pemerintah daerah di kabupaten mengetahui “Pengaruh *Good*
Pangkajene dan Kepulauan yang *Governance* Terhadap Kinerja
masih harus diperbaiki. Berdasarkan Keuangan Pemerintah Daerah
konsep pemikiran yang tertuang dalam Kabupaten Pangkajene dan
latar belakang, maka penulis Kepulauan”.
melakukan penelitian untuk

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan tahun 2017 dengan sampel dalam penelitian ini yaitu BPKD dan Dispenda terdiri dari 30 responden yaitu ketua, sekretaris dan staff. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif data didapatkan pada data yang telah diperoleh, disusun, dikelompokkan, dianalisis, kemudian diinterpretasikan sehingga diperoleh

gambaran sebenarnya. Pengumpulan data diperoleh dari data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan Uji Statistik Deskriptif dengan SPSS dan regresi linier sederhana dalam memprediksi permintaan dimasa akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas (*independent*) terhadap satu variabel tak bebas (*dependent*).

HASIL

Good Governance (X): *Good* mencakup item-item diantaranya *governance* ini merupakan tata kelola akuntabilitas, transparansi, keadilan, pemerintahan yang baik didalamnya partisipasi.

Tabel 4.1

Statistik Deskriptif Variabel *Good Governance* (X)

Pernyataan	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Pernyataan 1	30	4	5	4.56	0.52
Pernyataan 2	30	3	5	4.11	0.6
Pernyataan 3	30	3	5	4	0.5
Pernyataan 4	30	3	5	4.22	0.78
Pernyataan 5	30	3	5	3.89	0.78
Pernyataan 6	30	3	5	4.22	0.67
Pernyataan 7	30	3	5	4.11	0.6

(Hasil Olah Data SPSS 16.0)

1). Publikasi laporan keuangan tahunan dilakukan secara rutin. Rata-rata jawaban responden adalah 4,56 bahwa pejabat pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mampu bertanggungjawab dengan mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara rutin. Nilai standar deviasi sebesar 0,52 menunjukkan bahwa tidak ada jawaban yang bersifat ekstrim dan tidak *outliner*. *Outliner* apabila data tersebut lebih besar dari 2,5 standar deviasi. 2). Akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Rata-rata jawaban responden adalah 4,11 bahwa pejabat pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mampu secara transparansi dalam mengakses informasi. Nilai standar deviasi sebesar 0,6 menunjukkan bahwa tidak ada jawaban yang bersifat ekstrim dan tidak *outliner*. *Outliner* apabila data tersebut lebih besar dari 2,5 standar deviasi. 3). Hak pegawai diberikan secara proporsional. Rata-rata jawaban responden adalah 4 bahwa pejabat pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mampu menerapkan prinsip *good governance* dengan prinsip keadilan. Nilai standar deviasi sebesar 0,5 menunjukkan bahwa tidak ada jawaban yang bersifat ekstrim dan tidak *outliner*. *Outliner* apabila data tersebut lebih besar dari 2,5 standar deviasi. 4). Sistem hukum atau peraturan yang jelas dan penegakannya kepada semua pihak. Rata-rata jawaban responden adalah 4,22. bahwa pejabat pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mampu menerapkan prinsip *good governance* dengan prinsip keadilan. Nilai standar deviasi sebesar 0,78 menunjukkan bahwa tidak ada jawaban yang bersifat ekstrim dan tidak *outliner*. *Outliner* apabila data tersebut lebih besar dari 2,5 standar deviasi. 5). Sistem yang jelas dalam mengatur mekanisme pertanggung jawaban instansi. Rata-rata jawaban responden adalah 3,89 bahwa pejabat pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mampu bertanggungjawab dengan adanya sistem yang jelas dalam mengatur mekanisme pertanggung jawaban instansi. Nilai standar deviasi sebesar 0,78 bahwa tidak ada jawaban yang bersifat ekstrim dan tidak *outliner*. *Outliner* apabila data tersebut lebih besar dari 2,5 standar deviasi. 6). Mematuhi peraturan, ketentuan serta hukum yang berlaku dalam menjalankan tugas dan fungsi. Rata-rata jawaban responden adalah 4,22 bahwa pejabat pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mampu berpartisipasi

dalam penegakan hukum dan Kabupaten Pangkajene dan menjalankan tugas dan fungsi. Nilai Kepulauan mampu secara standar deviasi sebesar 0,67 bahwa transparansi untuk menyampaikan tidak ada jawaban yang bersifat informasi secara cepat, utuh, dan tepat ekstrim dan tidak *outliner*. *Outliner* waktu. Nilai standar deviasi sebesar apabila data tersebut lebih besar dari 0,6 menunjukkan tidak ada jawaban 2,5 standar deviasi. 7).Penyampaian yang bersifat ekstrim dan tidak informasi bersifat cepat, utuh dan tepat *outliner*. Dikatakan *outliner* apabila data tersebut lebih besar dari 2,5 standar deviasi. Rata-rata jawaban responden adalah 4,11 bahwa pejabat pemerintah standar deviasi.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Y):

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif Variabel Kinerja Keuangan (Y)

Pernyataan	N	Min	Max	Mean	Std Deviation
Pernyataan 1	30	4	5	4.33	0.5
Pernyataan 2	30	3	5	4.11	0.6
Pernyataan 3	30	3	5	4.33	0.70
Pernyataan 4	30	3	5	4.22	0.67
Pernyataan 5	30	3	5	4.33	0.70

(Hasil olah Data SPSS 16.0)

1).Seberapa tinggi kemampuan *outliner*. *Outliner* apabila data tersebut pejabat pemerintah daerah Kabupaten lebih besar dari 2,5 standar deviasi. Pangkajene dan kepulauan dalam 2).Seberapa tinggi kemampuan melakukan tugas perencanaan. Rata-rata pejabat pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan dalam melakukan tugas investigasi. Rata-rata jawaban responden adalah 4,33. Nilai ini menunjukkan responden memiliki kinerja tinggi dalam hal perencanaan. Nilai standar deviasi sebesar 0,5 bahwa tidak ada jawaban yang bersifat ekstrim dan tidak investigasi. Nilai standar deviasi

sebesar 0,6 bahwa tidak ada jawaban yang bersifat ekstrim dan tidak *outliner*. Outliner apabila data tersebut lebih besar dari 2,5 standar deviasi.

3).Seberapa tinggi kemampuan pejabat pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan dalam melakukan tugas koordinasi. Rata-rata jawaban responden adalah 4,33. Nilai ini menunjukkan bahwa responden memiliki kinerja tinggi dalam hal koordinasi. Nilai standar deviasi sebesar 0,70 bahwa tidak ada jawaban yang bersifat ekstrim dan tidak *outliner*. Outliner apabila data tersebut lebih besar dari 2,5 standar deviasi.

4).Seberapa tinggi kemampuan pejabat pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan dalam melakukan tugas evaluasi. Rata-rata jawaban

responden adalah 4,22 bahwa responden memiliki kinerja tinggi dalam hal evaluasi. Nilai standar deviasi sebesar 0,67 bahwa tidak ada jawaban yang bersifat ekstrim dan tidak *outliner*. Outliner apabila data tersebut lebih besar dari 2,5 standar deviasi.

5).Seberapa tinggi kemampuan pejabat pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan dalam melakukan tugas pengawasan. Rata-rata jawaban responden adalah 4,33 bahwa responden memiliki kinerja tinggi dalam hal pengawasan. Nilai standar deviasi sebesar 0,70 menunjukkan tidak ada jawaban yang bersifat ekstrim dan tidak *outliner*. Outliner apabila data tersebut lebih besar dari 2,5 standar deviasi.

Tabel 4.3

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Good Governance	30	24.00	35.00	29.9667	3.02271
Kinerja Keuangan	30	27.00	40.00	33.4667	3.82130
Valid N (listwise)	30				

(Hasil olah data SPSS 16)

Hasil Pengujian Hipotesis: Pengujian hipotesis dilakukan dengan tujuan untuk menguji ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dengan regresi

ditunjukkan dalam tabel-tabel berikut. Metode yang digunakan untuk melakukan analisis regresi adalah metode enter.

Tabel 4.4

Variables Entered/Removed ^b			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Good Governance ^a	.	Enter
a. All requested variables entered.			
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan			

Tabel 4.5

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.515	5.241		1.434	.163
	Good Governance	.866	.174	.685	4.976	.000
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan						

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.5 diperoleh model persamaan regresi $Y = 7.515 + 866X + e$ konstanta sebesar 7.515 menyatakan bahwa jika tidak ada *good governance*, maka kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan akan sebesar 7.515 koefisien X = 866, menunjukkan bahwa *good governance* (X) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan. standar error (e) menunjukkan tingkat kesalahan pengganggu.

Hal ini berarti bahwa jika *good governance* ditingkatkan, maka akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan.

standar error (e) menunjukkan tingkat kesalahan pengganggu

Hasil Pengukuran Adjusted R²:
Adjusted R² pada intinya mengukur

seberapa jauh kemampuan model kepulauan (Y). “*adjusted* dianggap dalam menerangkan variasi variabel, lebih baik dan R^2 karena nilai *adjusted* dalam hal ini *adjusted* digunakan untuk R^2 dapat naik ataupun turun apabila mengetahui seberapa jauh ada suatu variabel independen kemampuan *good governance* (X) ditambahkan dalam model” dalam kinerja keuangan pemerintah (Ghazali,2005) dalam skripsinya Putri daerah kabupaten pangkajene dan Lubis, 2010.

Tabel 4.6

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.685 ^a	.469	.450	2.83312
a. Predictors: (Constant), Good Governance				

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat hasil analisis regresi secara keseluruhan menunjukkan *adjusted R²* sebesar 0,450 yang berarti bahwa variabel dependen (kinerja keuangan) dapat dijelaskan oleh variabel independen (*good governance*) yang dimana apabila nilai *adjust R²* dimulai dalam jumlah presentase adalah sebesar 4,50%.

apakah pemberlakuan *good governance* (X) berpengaruh simultan terhadap kinerja keuangan (Y) Bila nilai $F > 4$, maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 0,05 (5%), artinya hipotesis yang diterima adalah bahwa variabel independen dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji ini dapat dilihat pada tabel 4.7.

Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji-F):

Uji-F dilakukan untuk mengetahui

Tabel 4.7

Uji F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regressio	198.723	1	198.723	24.758	.000 ^a

	n					
	Residual	224.744	28	8.027		
	Total	423.467	29			
a. Predictors: (Constant), Good Governance						
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan						

Dari uji ANNOVA (*Analysis Of Variance*) atau uji-F, maka didapat F hitung sebesar 24.758 dengan tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Oleh karena itu, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi kinerja keuangan pemerintah. Dengan begitu *good governance* secara simultan berpengaruh terhadap kinerja

keuangan pemerintah daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan.

Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji-T):

Uji-t dilakukan untuk menguji secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten pangkep dan kepulauan (Y). Hasil uji-t dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Regresi Linear

Uji t					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.515	5.241		1.434	.163
Good Governance	.866	.174	.685	4.976	.000
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan					

Dari hasil Uji-t dapat diketahui secara parsial terhadap kinerja bahwa variabel yang berpengaruh keuangan pemerintah daerah

pangkajene dan kepulauan adalah variabel dengan signifikan $<0,05$. Pada tabel 5.8 menunjukkan nilai signifikan masing-masing variabel. Nilai sig *good governance* = 0,000 ($<0,005$) berarti

secara parsial, semakin tinggi *good governance* maka semakin tinggi pula kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data-data yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah *good governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan. Pada penelitian ini terdapat satu variabel independen dan satu variabel dependen. Sampel yang diambil ada 2 yaitu bagian BPKD dan Dispenda yang terdiri atas kepala badan dan sekretaris BPKD, kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin, kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan, kepala Bagian Keuangan, kepala Bidang Anggaran, kepala Bidang Perbendaharaan, kepala Bidang Akuntansi dan staff, kepala Aset Daerah. Serta bagian Dispenda 20 orang kepala bidang dan staff. Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode statistik uji-F, uji-t dan *adjusted R Square* dalam aplikasi program SPSS analisis regresi linier. Penelitian ini tidak menggunakan uji multikolinearitas karena variabel yang digunakan hanya terdiri dari dua

variabel menggunakan satu variabel independen (*good governance*) dan variabel dependen (kinerja keuangan). Yang dimana kedua variabel bebas diantaranya. Hasil pengujian yang ditentukan diungkapkan dibawah ini.

Berdasarkan hasil pengujian, penelitian ini mampu memberikan secara simultan bahwa *good governance* berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan. Dengan ditemukan H_a diterima. Apabila diuji secara parsial maka, didapatkan bahwa *good governance* berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini terjadi mungkin karena hak pegawai diberikan secara proporsional. Angka *R Square* atau *adjusted R* dari hasil penelitian ini adalah sebesar 0,450 yang berarti bahwa variabel dependen (kinerja keuangan) dapat dijelaskan oleh variabel independent (*good governance*) yang dimana apabila nilai *adjust R²* dimulai dalam

jumlah presentase adalah sebesar 4,50%. Jumlah sampel yang digunakan relatif sedikit sehingga tingkat keseluruhan dari penelitian ini cukup rendah, karena menggunakan kuesioner ada kemungkinan respon bias dari responden karena tidak serius dalam memberikan jawaban maka peneliti memberikan saran untuk peneliti selanjutnya menambah jumlah sampel yang diteliti dengan demikian diharapkan tingkat generalisasi dari analisis akan lebih akurat, Menambah variabel independen, dependen, *moderating*, *intervening* yang memiliki kemungkinan untuk berpengaruh terhadap hubungan antara *good governance* dan pengendalian intern terhadap kinerja keuanagn, Sebaiknya peneliti selanjutnya menggunakan metode observasi atau pengamatan langsung kepada objek penelitian untuk menghindari respon bias akibat penggunaan kuesioner atau menggunakan metode eksperimen sebagai pengganti metode kuesioner.

Hasil dari penelitian ini juga mampu meberikan kontribusi lebih kepada pengembangan metode penerapan *good governance*. Juga dapat melengkapi penelitian-penelitian selanjutnya. Dengan demikian penelitian ini dapat dijadikan sebagai refrensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, Mukhlis Yunus, dan Sulaiman (2015) Pengaruh penerapan *good governance* terhadap kinerja pegawai dan dampaknya terhadap kinerja dinas pertanian dan peternakan Kabupaten Bireuen. Jurnal Vol.4 No.4
- Amelia Adinda Nancy Supit,dkk. (2014) ISSN 2303-1174 Analisis Kinerja Non Keuangan PT. Otsuka Indonesia Cabang Manado. Jurnal. Vol.2 No.2 Juni 2014. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado
- Dwi Susanto, dkk (2015) Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kualitas Pemberian Layanan Publik. Jurnal paradigma vol.12 no.02
- Dwi Susanto, dkk. Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kualitas Pemberian Layanan Publik.

ISSN : 1693-0827 Jurnal
 Paradigma Vol. 12, No. 02,
 Agustus 2014 – Januari 2015
 Hal. 75

masyarakat terhadap pelayanan
 publik di DKI Jakarta

F Daus AR (2016) Dialog Publik, Dinas
 Kesehatan Pangkep, Pansus
 Kesehatan DPRD, Pelayanan
 Kesehatan, Puskesmas, RSUD
 Pangkep

Intihanah dan Nur Afifa Muthia S.
 Pengaruh Partisipasi Anggaran
 dan Good Governance terhadap
 kinerja Pemerintah daerah (studi
 pada dinas kesehatan kota
 Kendari). Jurnal akuntansi dan
 keuangan fakultas ekonomi dan
 bisnis UHO

F. Ekhomawaty (2012) BAB III Metode
 Penelitian.
[eprints.walisongo.ac.id/742/4/08
 2411097_Bab3.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/742/4/082411097_Bab3.pdf). internet.
 dikutip pada 13 agustus 2017
 pukul 23.22 Wita

Ira Amelia, Desmiyawati, Nur Azlina.
 Pengaruh good governance,
 pengendalian intern, dan budaya
 organisasi terhadap kinerja
 pemerintah daerah (studi pada
 satuan kerja pemerintah
 kabupaten pelalawan) jurnal.

Garnita, Nita (2008) Pengaruh
 Akuntabilitas Terhadap Kinerja
 Instansi Pemerintah. Skripsi

Khafid, (2008) Penerpan Prinsip-
 Prinsip *Good Governance* dalam
 Kaitannya Kepuasan Masyarakat
 Terhadap Pelayanan Publik

Handi Yuniar Lestiawan & Bambang
 Jatmiko (2016) *Key Success
 Factor Good Government
 Governance* serta Pengaruhnya
 Terhadap Kinerja Pemerintah
 (Survey pada Pemerintah
 Kabupaten Gunungkidul) jurnal
 Vol. 5 No.1.

Kountur, Ronny (2005) Statistik
 Praktis. Jakarta: PPM

*Indonesian Institute For Civil Society
 (INCIS)* (2005) Defisit pelayanan
 publik: survei persepsi

Kusmayadi, Dedi (2009) Pengaruh
 Pengawasan Intern dan
 Penatausahaan Keuangan
 Daerah Terhadap *Good
 Governanment Governance*.

- Jurnal Ichsan Gorontalo Vol.4 No.2
- pelalawan. Jurnal akuntansi universitas jember vol.12 no.02
- Mahsun (2006) Dalam Auditya, Lucy dkk (2013) Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Fairness Vol.3 No.1
- Mirza, Rifka Amalia (2012) analisis kinerja keuangan pemerintah pusat 2005 sampai tahun 2010. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang
- Muh. Subhan (2016) <http://www.makassarterkini.com/Berita/3403/-Kinerja-Skpd-Pangkep-Jauh-Dari-Target>
- Nining Ade Ningsih, Indar, dan Amran Razak. Analisis Hubungan Prinsip-prinsip *Good Governance* dengan Kinerja Pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur. Jurnal
- Nur Azlina dan Ira Amelia (2014) Pengaruh *Good Governance* dan pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah kabupaten
- Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Pertiwi, Siti Hardianti Darma (2017) Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Pemerintahan Desa Nepo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. Skripsi. Makassar: Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar
- Siregar, Muhammad Arifin (2008) Penerapan Tata Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan Provinsi Bengkulu. Tesis
- Siti Aisyah, Karmizi, dan Enni Savitri (2014) Pengaruh *Good*

- Governance*, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi dan budaya terhadap kinerja pemerintah daerah (studi pada pemerintah daerah kabupaten kampar). JOM FEKON Vol.1 No.2
- Tri Endar Susianto dan Suyatno. Bukti Empiris Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* pada Kinerja Koperasi di Sukabumi. Jurnal riset akuntansi dan perpajakan vol.1 no.2.
- Soemantri Yusuf, Dedy (2009) Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung
- Trisnaningsih, Sri (2007) Indenpendensi Auditor dan Komitmen Organisasi Sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman *Good Corporate Governance*, Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Auditor. Jawa Timur: Simposium Nasional Akuntansi X
- Sugiyono (2009) Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Syafitri, Nurul (2016) Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Sebelum dan Setelah Akuisisi dan Merger pada PT. XI Axiata, Tbk. Jakarta. Skripsi
- Wala Siti Nurlaela (2015) Pengaruh *Good Governance* dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Survei pada Dinas SKPD Kabupaten Ciamis) jurnal